

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 8 PP NO. 10 TH. 1983 JO. PP. NO.45 TH.1990)

Nilkhairi

Pengadilan Agama Kota Bengkulu

Email: putilayangseni@gmail.com

Abstract: The formulation of this research is: Firstly, how does Islamic law manage the livelihood obligation given by a husband to ex-post-divorce wife? Second, how the review of Islamic law against article 8 of Government Regulation no. 10 Year 1983 Jo. PP no. 45 of 1990 on the obligation of Civil Servants to provide for the former post-divorce wives? The method used is qualitative descriptive, with normative juridical approach. This study concludes that: First, Islamic Law regulates the obligation of a husband's livelihood to ex-wife after the divorce of mut'ah that is giving entertainment to his ex-wife and giving iddah livelihood is the livelihood given by the former husband to the ex-wife during the former wife run the iddah period in talak raji. Both obligations are tailored to the ability of ex-husbands and the level of propriety prevailing in society so as not to burden the burden of ex-husband. There is no obligation to provide more for the former husband after the ex-wife past the iddah period. Second, the obligation of the former civil servant's husband to give 1/3 of his salary after divorce to his ex-wife until the former wife is remarried, as regulated in Article 8 PP Number 10 of 1983 jo PP No. 45 of 1990 contrary to and contrary to the provisions of Islamic Law because in Islam the obligation of the former husband to give a living to the former wife only in the iddah period because it is the provision of 1/3 salary to the former wife until the former wife married again will cause mudharat both for the former husband himself and the former family of the former husband.

Keywords: The Provision, Servant Wife, Government Regulation, Islamic Law

Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca perceraian? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca perceraian adanya mut'ah yakni pemberian hiburan kepada bekas isterinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri selama bekas isteri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah bekas isteri melewati masa iddah. Kedua, kewajiban bekas suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada bekas isterinya sampai bekas isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak-belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada bekas isteri hingga bekas isteri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi bekas suami itu sendiri maupun keluarga baru bekas suami tersebut.

Kata kunci: Nafkah, Peraturan Pemerintah, Hukum Islam

Pendahuluan

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.¹ Ketentuan yang terkait hak dan

kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

¹ Abdul Rahman I, Perkawinan dalam syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipata, 1996), h129

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri diungkapkan lebih rinci dalam firman-Nya dalam At-Thalaq (65) ayat 7 yang berbunyi:



Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan secara tektual tentang berapa ukuran nafkah yang pasti justru menunjukkan kelenturan Hukum Islam dalam menetapkan aturan nafkah.²

Kewajiban yang melekat kepada suami menjadi hak yang dimiliki isteri, dalam hal nafkah suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban tersebut juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya.

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut'ah) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan

nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya³.

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu atas kehendak istri, pemberian itu tidak wajib.⁴ Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada Q. S at-Talaq (65): 6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Ibn Katsir dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa kelebihan suami atas istri adalah bahwa suami bertanggung jawab nafkah pada istrinya. Dasar inilah yang menyebabkan seorang suami berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena adanya kewajiban memberikan nafkah itu. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah an-Nisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.⁵

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun,

³ Departemen R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) h. 69

⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h.397

⁵ Zaini Ahmad Noeh, "Pandangan Fiqh tentang Hak dan Kewajiban Perempuan" dalam Lily Z. Munir, Memposisikan Kodrat..., h. 152; Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat..., h. 157-159.

² Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 7479

jika seorang istri masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberikan nafkah (mut'ah) yang wajar menurut kemampuannya dan kelayakannya kepada isterinya.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada bekas isteri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum adanya talak dalam ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban berikut:

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Mengenai besarnya mut'ah diterangkan dalam pasal 160 bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Berbeda halnya dengan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil—yang juga merupakan hukum positif—diatur ketentuan yang sama sekali berbeda bahkan kontradiktif baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) di Indonesia.

Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan isteri dan anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing 1/3 (sepertiga) untuk suami, yakni 1/3 untuk bekas isteri dan 1/3 untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak, maka ketentuannya adalah ½ gaji PNS diberikan untuk bekas isterinya. Ketentuan ini berlaku sampai bekas isterinya nikah lagi dengan pria lain.

Untuk memperketat pelaksanaannya, maka pada tahun 1990 dikeluarkan pula Peraturan

Pemerintah No.45 Tahun 1990 yang mengatur tentang perubahan, penghapusan, dan penegasan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Berkaitan dengan ini, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menegaskan bahwa pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri berzina, melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap suami, pemabuk, pemadat, penjudi dan atau meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun berturut-turut.

Permasalahan seputar nafkah pernah menjadi sorotan tajam di media massa pada akhir tahun 2000 ketika terjadi polemik pro-kontra pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Seperti dikatakan Nuke Satyani Arafah, akibat perceraian diatur pasal dalam ayat 2 “gaji PNS yang bercerai harus dibagi tiga, sepertiga bagian diterimakan kepada istri, anak-anak, dan si suami”. Karena itu seorang PNS yang bercerai sebaiknya berfikir lebih cermat, karena kalau PP 10/1983 ditegakkan, suami tersebut hanya akan menerima sepertiga gaji saja, ketentuan nafkah yang sudah jelas ada peraturan dan keputusan pengadilan saja, banyak bekas suami masih berkilah dan tidak pernah memenuhi kewajiban hukum.⁶ Dalam kasus perceraian ini jelas seorang suami yang PNS merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut yang bahkan menyalahi ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada dasarnya tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi PNS, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

⁶ Kompas, PP 10/1983 Sebaiknya Disempurnakan Saja, Jakarta: 2 Oktober 2000, h. 10

⁷ Dewan Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-1, Jilid. VI, h.1869

Sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga menganut azas monogami dan kekal. Sedangkan ketentuan khusus dan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya menyangkut masalah ketentuan nafkah bekas isteri sebagai akibat terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan ajaran hukum Islam merupakan permasalahan utama yang menjadi kegelisahan akademik penelitian ini baik dari segi materi maupun segi praktik di lingkungan Peradilan Agama.

Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam bentuk tesis.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian?

Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini untuk mendeskripsikan:

- a. Hukum Islam mengatur kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca perceraian.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 8 PP No. 10 Th.1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian.

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan mengenai

masalah-masalah tentang nafkah maupun mut'ah istri setelah terjadi perceraian.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia dinyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.⁸

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut.

Adakalanya sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dikarenakan berbagai kendala atau permasalahan baik dikarenakan perbedaan pandangan dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga mereka atau karena adanya pengkhianatan dari salah satu pihak mereka.

Sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam telah dibahas, diantaranya:

- 1) Kematian, kematian suami atau istri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan syara', istri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.
- 2) Talak (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.
- 3) Khulu' (tebus talak) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau 'iwadl atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri.
- 4) Li'an, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau istri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya.⁹
- 5) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an

⁸ M. Hasbi, ash-Shiddieqy, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: BulanBintang, 1996), h. 31.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 69

disebut syiqaq,¹⁰ dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui peraturan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian atau talak. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, yaitu: nafkah mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,¹¹ sebagaimana bunyi pasalnya: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.¹²

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dilingkungkannya. Maka dalam hal ini pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan, bagi perkara orang Islam dalam hal perdatanya seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu hakim Pengadilan Agama diminta untuk mencegah atau bisa menjadi juru damai (Hakamain) sekaligus penegak hukum untuk mengadili perkara para pihak, dengan harapan menemukan keadilan.

Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari نفقة yang berarti belanja, kebutuhan pokok dan juga berarti biaya atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.¹³

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa – yunfiqu- infaqan (انفق - ينفق - انفاق)¹⁴ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan¹⁵. Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.¹⁶

Mengacu kepada beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedang menurut Faiz nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah

¹⁰ Ahmad. Rafiq. Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 272

¹¹ Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 255

¹² Marjiman Prodjohamidjojo. Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011) Cet. 3, h. 83

¹³ Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga, (Jakarta, Elsas, 2011) h. 50

¹⁴ al-Munjid fi al-Lugat wa al-i`lam, (Beirut, al-Maktabah al – Syirkiyah, 1986) h. 828

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir, (Yogyakarta, Pondok Psantren al-Munawwir, 1984) h. 1548.

¹⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V, h. 151.

terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung dengan keadaan dan tempatnya.¹⁷

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁹

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap nafkah setelah perceraian PNS, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

Pembahasan

Kewajiban Membayar Nafkah

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" senada pula dengan bunyi Pasal 3 KHI bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Begitu indah dan mulia tujuan perkawina itu. Mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan. Setelah perkawinan itu dijalani, banyak permasalahan dihadapi yang bisa menyebabkan rumahtangga pecah dan bercerai .

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.²⁰

Mengenai salah satu hak bekas isteri dari PNS dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990 yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Sedangkan mengenai pembagian gaji bekas suami tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 yang menyatakan bahwa Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri

¹⁷ Ahmad Faiz, Cita Keluarga Islam, (Jakarta, Dirurais, 2002) h. 88

¹⁸ Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta. Rajagrafindo, 2009) h. 167

¹⁹ H Abu Ahmad dan Cholid Nabuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Angkasa 2002), h. 23

²⁰ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta, UI Press, 2010) h. 78

Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji bekas suami menjadi hapus sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990.

Mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pasal 8 (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.²¹ Kemudian PP Nomor 45 tahun 1990 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 10 tahun 1983 hanya mengatur pengecualian dari kewajiban pemberian nafkah kepada bekas isteri yang berbunyi: pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut.²²

Ketentuan pada pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 dan pasal 4 PP Nomor 45 tahun 1990 di atas dengan tegas mewajibkan kepada suami untuk memberikan sebagian gajinya sebagai nafkah kepada bekas isteri. Kewajiban itu gugur jika isteri melakukan perbuatan yang tergolong nusyuz. Demikian pula Hukum Islam dengan tegas pula menyatakan adanya keharusan bagi suami memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Namun dalam kewajiban memberi mut'ah ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat.

Ketentuan Besar Nafkah

Mengenai ketentuan tentang pemberian nafkah diatur pada Pasal 8 yang berbunyi: (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri

dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. (2) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. (3) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu. (5) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Sepertinya hal perkawinan, perceraian juga mempunyai implikasi hukum yang harus ditanggung bagi kedua belah pihak. Bagi mereka yang beragama Islam implikasi hukum perceraian telah diatur dalam hukum Islam baik yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh karya para intelektual muslim (fuqaha), ataupun hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Bagi umat Islam bila mematuhi aturan hukum-hukum tersebut maka tentunya akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Hukum positif di Indonesia yang bertalian dengan perbuatan hukum bagi umat Islam seharusnya searah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam agar tidak terjadi kontradiktif.

Namun tidak demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang seharusnya searah dengan hukum Islam konvensional yang terdapat pada kitab-kitab fikih maupun searah dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pada di satu sisi mengikuti aturan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, namun di sisi lain berlawanan dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Dalam konteks ini, salah satu di antaranya berkaitan pemberi nafkah kepada bekas isteri akibat terjadinya perceraian bagi PNS.

Terkait dengan analisis topik ini, penulis akan membahas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dengan membandingkan dengan aturan yang terdapat dalam Hukum Islam (fikih), undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1983

²² Pasal 4 PP Nomor 45 tahun 1990

Adapun akibat putusnya perkawinan dalam hukum positif ada perbedaan antara perceraian karena cerai talak di satu sisi, dan cerai talak di satu sisi, dan cerai gugat di sisi lain. Akibat karena cerai talak adalah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, (d) suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal, (maskan) dan kiswah selama masa iddah, (f) suami wajib melunasi mahar yang masih terutang.²³

Disamping itu, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih iddah,²⁴ dan bekas isteri selama masa 'iddah wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.²⁵ Pemelihara anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibu. Pemelihara anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung bapaknya.²⁶

²³ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41, "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya, (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; khl pasal 149, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla duhkul; b. Memberi nafka, maskan dan kiswah kepada istri selama iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qalba al-dukhul, dan d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

²⁴ KHI, pasal 150, "Bekas istri berhak melakukan ruju' kepada istrinya yang masih dalam masa iddah.

²⁵ KHI, pasal 152, "Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain".

²⁶ KHI, pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibu, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dengan batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tua.²⁷ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.²⁸ Demikian juga duda atau janda cerai hidup.²⁹

Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah, b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain, d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d), d. Harta bersama dibagi dua.

Adapun akibat putusnya perkawinan bagi PNS ada dua kemungkinan: pertama, apabila cerai atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas isteri dan anak-anaknya. Kedua, kalau perceraian atas kehendak isteri, ia tidak berhak mendapat bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali isteri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Adapun alasan perceraian yang mengakibatkan bekas isteri tetap berhak mendapat bagian dari penghasilan bekas suami adalah isteri berzina, atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri

²⁷ KHI, pasal 76, "Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya".

²⁸ KHI pasal 96 ayat 1, "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi haka pasangan yang hidup lebih lama".

²⁹ KHI pasal 97, "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Adapun pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk isteri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Kalau tidak ada anak, isteri mendapat setengah. Sementara kalau bekas isteri kawin lagi, haknya dari bekas suaminya hilang dihitung mulai ia kawin lagi.

Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada sub khusus membahas nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah. Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 misalnya disebutkan, “suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Kemudian pada pasal 34 disebutkan, ayat (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (3), “Jika suami atau isteri melalikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Dari bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut diatas hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah, yakni dengan menyebut, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.

Aturan yang sedikit rinci ditemukan dalam KHI. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilnya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan isi pasal 34 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian dalam pasal 80 ayat (7) disebutkan, “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”. Dapat disimpulkan bahwa hak

nafkah isteri dan segala unsur-unsurnya hilang kalau melakukan nusyuz.

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas isteri. Kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam tanggungan suami, yakni dalam masa iddah, karena statusnya masih isteri suami. Dengan demikian tidak ada nafkah bila melewati masa iddah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 aturan akibat hukum perceraian bagi PNS yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa pemberian nafkah kepada bekas isteri ditentukan secara pasti kadarnya, yakni setengah dari gaji suami bila tidak ada anak, dan sepertiga bila ada anak. Pembeian nafkah berlangsung meskipun masa iddah telah berlalu, dan pemberian nafkah berakhir sampai bekas isteri menikah lagi dengan berlalu, dan pembeian nafkah berakhir samapai bekas isteri menikah lagi dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberatkan dan merugikan bagi bekas suami. Dengan demikian, maka aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian bagi PNS itu jelas berlawanan dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu aturan tersebut tidaklah relevan dan kontradiktif.

Meskipun pengaturan masalah kewajiban suami terhadap istri telah diatur sedemikian rupa namun pemerintah membuat pula suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah itu (untuk selanjutnya disebut PP) tersebut khusus diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil di samping undang-undang lain yang berlaku bagi rakyat Indonesia . Berbeda dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya kedua Peraturan Pemerintah ini memang tidak menamakan kewajiban tersebut dengan sebutan nafkah, namun dengan ungkapan ‘wajib’ seolah-olah kewajiban tersebut adalah nafkah.

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun

1983 memuat tentang bentuk perceraian dan alasan perceraian serta kapan seorang isteri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji, disamping itu juga memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga janda itu menikah lagi. Kemudian ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tersebut diadopsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dengan penyempurnaan tentang alasan perceraian yang menyebabkan janda tersebut tidak mendapatkan hak gaji serta penetapan sanksi tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang tidak bersedia menyerahkan sebagian gajinya untuk jandanya.

Mencermati konsideran Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah Pemerintah tersebut disatu sisi menekankan kearah peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rumah tangganya sehingga Peraturan Pemerintah ini dianggap sama seperti peraturan disiplin lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Di samping itu dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini dikaitkan pula dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyebabkan Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari hukum materil yang harus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Munculnya kedua kenyataan tersebut dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini menimbulkan dua persepsi pula dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di pengadilan sehingga lahirnya yurisprudensi yang menyerahkan penyelesaian hak janda tersebut kepada instansi tempatnya bekerja.

Penetapan jumlah seperdua dan sepertiga gaji tersebut juga terkesan memberatkan suami, padahal secara tekstual ayat dan hadis tidak satupun yang memberikan batasan minimal atau maksimal terhadap nafkah isteri tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Di samping itu dalam fikih tidak dikenal adanya kewajiban suami kepada isteri setelah terjadinya perceraian, kecuali selama masa iddah. Penetapan hak terhadap janda dalam Peraturan Pemerintah ini juga terkesan kurang memperhatikan bekas suami karena selain dibebani menyerahkan seperdua atau sepertiga gaji untuk bekas isterinya juga masih terkait kewajiban lain berupa nafkah iddah, uang mut'ah atau kewajiban terhadap keluarganya yang baru, pada hal penerimaan gajinya hanya sepertiga dari jumlah yang biasanya diterima.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaqan ghalizha*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi istri.

Menurut al-Qurthubi ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah isteri selama masa iddah talak raj' i. Selanjutnya al-Qurthubi berpendapat bahwa ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Al-Qurthubi menambahkan bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Dalam ayat juga ditegaskan bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih taat atau isteri berbuat nusyuz, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya. Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada bekas suami atau kepada bekas isteri. Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali qabla ad dukhul; memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qabla ad-dukhul; memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. dan memberikan nafkah iddahnyanya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya nusyuz.³⁰

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Hasanuddin, (Jakarta, Pena, 2006) h. 233

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu. Menurut mazhab Hanafi, bekas suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (bekas isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa 'iddah, menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur), sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga. Sedangkan berkaitan dengan 'iddah bagi bekas isteri yang dicerai suaminya yang masih hidup (cerai hidup), adalah: a. Jika perempuan itu masih haid, 'iddahnya 3 kali suci; b. Jika perempuan yang ditalak belum/ tidak haid karena belum saatnya (misalnya: usianya masih sedikit atau tidak haid lagi karena sudah tua maka 'iddahnya 3 bulan).³¹

Berdasarkan beberapa dalil nash di atas dapat dipahami bahwa ada tiga kewajiban yang harus dipenuhi suami yakni kewajiban menyediakan kiswah, tempat tinggal, nafkah, ketiga, kewajiban tersebut berlaku sampai habis masa iddah. Sedangkan kewajiban mut'ah tidak dibatasi waktunya karena pemberian tersebut merupakan hiburan bagi isteri yang dicerai.

Penulis berpandangan bahwa kedua Peraturan Pemerintah ini sepertinya tidak memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak. Misalnya ketika suami mengambil inisiatif dalam perceraian dimungkinkan suami tersebut tidak sanggup meneruskan perkawinan karena sikap isteri yang kurang baik, dan suami memandang bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini cukup adilkah penetapan suatu kewajiban kepada bekas suami (apalagi kalau bekas suami tersebut telah berstatus Pegawai Negeri Sipil sebelum pernikahan berlangsung).

Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam hal ini Sayuti Thalib berpendapat bahwa diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang dicerai menurut keadaan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami.³²

Berdasarkan uraian dan pendapat di atas, menurut penulis pemberian nafkah kepada bekas isteri setelah perceraian merupakan kewajiban suami terhadap bekas isterinya. Dalam kaitannya dengan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pemberian nafkah kepada bekas isteri telah diatur oleh pemerintah dalam PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Antara ketentuan hukum Islam sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan Peraturan Pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak-hak perempuan sebagai bekas isteri berupa nafkah. Hanya saja dalam Islam tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah nafkah sedangkan nafkah yang harus dibayarkan oleh seorang PNS kepada bekas isterinya sudah ditentukan secara pasti besaran angkanya.

Setelah bercerai, baik Pegawai Negeri Sipil sebagai bekas suami bersangkutan maupun bekas isteri harus menjalankan kehidupan mereka masing-masing secara terpisah. Seiring dengan perjalanan kehidupannya, bukan tidak mungkin masing-masing menemukan pasangan hidup yang baru dan membangun keluarga barunya itu bersama pasangan masing-masing. Bagi bekas suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, di samping harus menafkahi keluarga barunya, masih harus dibebani dengan kewajiban memberikan nafkah kepada bekas isterinya sebagaimana telah ditentukan dalam

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, (Jakarta, Lentera, 2011) h. 433

³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, UI Press, 2009) h. 78

PP Nomor 10 tahun 1983 maupun PP Nomor 45 tahun 1990 Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yaitu kewajiban memberikan nafkah dari gajinya sebesar $\frac{1}{3}$ bagian jika perceraian itu atas kehendak suami dan $\frac{1}{3}$ bagian lagi untuk anak. Jika tidak mempunyai anak maka bekas suami berkewajiban memberikan $\frac{2}{3}$ bagian atau setengah dari gajinya. Jika kemudian bekas isteri mendapatkan pasangan yang baru dan membina kehidupan keluarga barunya maka hak untuk mendapatkan nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari gaji bekas suami menjadi hilang sehingga suami tidak memiliki kewajiban lagi atas pembagian nafkah tersebut.

Permasalahannya adalah, di dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS baik PP nomor 10 tahun 1983 maupun PP 45 tahun 1990 tidak diatur secara jelas dan tegas tentang bagaimana jika bekas isteri pada akhirnya tidak menikah lagi. Hal ini tentu saja menimbulkan perbedaan persepsi bagi banyak pihak terutama bagi bekas isteri yang merasa masih terus mendapatkan haknya selama ia tidak menikah lagi, perceraian atas kehendak suami dan ia tidak berbuat nusyuz dan pada akhirnya muncul adanya dampak positif dan negatifnya, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Perceraian antara FU (suami) dengan Est (isteri) yang bercerai pada tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Akta Cerai nomor 0455/AC/2013/PA Bn.

Konflik rumahtangga antara FU dan isterinya Est terjadi sejak tahun 2013. Dalam kurun waktu tersebut, FU sebagai suami sudah melihat gejala bahwa isteri selalu memaksa bahwa setiap harta yang dimiliki harus atas nama isteri sehingga FU sebagai suami merasa bahwa isteri telah merencanakan perceraian dan surat menyurat berharga disimpan isteri tanpa sepengetahuan suami. Kemudian sejak tahun 2005 isteri pindah tugas ke Puskesmas Kepahiang. Karena merasa penghasilannya lebih besar dari suami maka Est selaku isteri menunjukkan sikap sombong dan angkuh. FU selaku suami merasa tersiksa batin karena:

- a. Isteri selalu mengambil semua penghasilan suami dan uang gaji ditabungkan tanpa diketahui suami.
- b. Isteri memaksa untuk mendapatkan uang lebih banyak, jika tidak berhasil

maka suami dimusuhi dengan sikap tidak mau menjalankan kewajiban isteri terhadap suami, suka melawan, tidak mau melaksanakan pekerjaan sebagai isteri di rumahtangga, selalu memancing keributan dan berujung tidak tidur satu kamar.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, setelah melalui berbagai proses perceraian di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memutuskan perceraian antara FU dan Est berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu nomor 0455/AC/2013/PA/Bn. Setelah terjadi perceraian FU selaku bekas suami telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 yaitu memberikan nafkah kepada bekas isteri $\frac{1}{3}$ bagian dari gaji dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak.

Pada tanggal 20 Januari tahun 2016, Est mengirimkan surat kepada instansi tempat bekas suaminya bekerja di Jakarta dan tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Dalam suratnya, Est menyampaikan bahwa FU (bekas suami) sejak bercerai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 (saat surat tersebut dibuat oleh Est) bekas suami tidak pernah memberikan $\frac{2}{3}$ gajinya kepada Est sebagai bekas isteri sedangkan FU sebagai bekas suami telah menandatangani surat pernyataan bersedia membayar $\frac{2}{3}$ gaji. Surat dari Est tersebut kemudian telah pula ditanggapi oleh pihak BKN dan Kementerian PUPR tempat FU bekerja, masing-masing memerintahkan kepada FU untuk membayar hak bekas isteri sebesar $\frac{2}{3}$ gajinya dan jika tidak dibayarkan maka yang bersangkutan akan terkena sanksi disiplin sebagaimana terdapat dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Menanggapi hal ini, kemudian bekas suaminya menyampaikan sanggahan tentang pembagian gaji yang harus dibagi kepada bekas isteri. Menurut FU, seorang PNS selain menerima gaji juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan capaian kinerja PNS yang bersangkutan sedangkan gaji diberikan berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan bukan berdasarkan kinerja sehingga antara gaji dan tunjangan kinerja berbeda.

FU saat surat sanggahan tersebut dibuat telah mempunyai isteri sah sehingga mempunyai

tanggungannya terhadap keluarga barunya itu. Selama ini ia merasa telah secara rutin membayar kewajibannya melalui pemotongan gaji tidak termasuk tunjangan kinerja. Jika gaji beserta tunjangan kinerja dibagi kepada bekas isteri sebesar $\frac{2}{3}$ ($\frac{1}{3}$ untuk bekas isteri dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk anak) ia merasa sangat kesulitan untuk membiayai keluarganya. Padahal jika gaji saja yang dibagi kepada bekas isteri, maka tunjangan kinerja dirasa cukup untuk membiayai kehidupan rumahtangganya bersama isteri barunya. FU merasa berada dalam posisi dilema, jika tidak memenuhi kewajiban memberikakan gaji $\frac{2}{3}$ kepada bekas isteri akan terjadi pelanggaran, tetapi jika yang diberikan tersebut termasuk pula tunjangan kinerja maka akan berpengaruh kepada kehidupan keluarga barunya.

2. Seorang PNS menceraikan isterinya dan oleh pengadilan diputuskan yang bersangkutan berkewajiban membayar:

- a. Uang iddah, mut'ah (kiswah dan maskan) dan nafkah lampau yang terhutang.
- b. Kewajiban berdasarkan pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 berupa uang nafkah kepada bekas isteri.

Karena bekas suami akhirnya menikah lagi maka ada dua pihak yang harus ia nafkahi yaitu bekas isteri dan isteri baru dan inilah yang menyebabkan isteri baru menjadi merasa hasil keringat suaminya secara terus menerus dinikmati orang lain meskipun itu bekas isteri sehingga isteri menjadi kecewa dengan kondisi ini.

3. Seorang PNS dan isterinya pisah ranjang tanpa ada kejelasan status hanya karena menghindari PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri. Sebaliknya isteri dengan sengaja tidak mau menuntut cerai suaminya karena takut tidak mendapatkan haknya sebagai bekas isteri.
4. Seorang bekas isteri menikah lagi secara siri agar tetap mendapatkan hak nafkahnya dari bekas suami. Dengan melakukan nikah siri maka nafkah tetap diperoleh karena tidak ada bukti tertulis yang sah untuk membuktikan bahwa ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Mencermati beberapa contoh kasus di atas menurut hemat penulis menunjukkan adanya

dampak dari penerapan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Islam, seorang bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah. Dengan kata lain, jika masa iddahnya telah selesai maka putus pula kewajiban bekas isteri untuk memberikah nafkah kepada bekas isterinya itu, kecuali nafkah untuk anak yang masing dalam tanggungan. Tidak adanya aturan khusus secara tektual dalam Islam yang mengatur besaran nafkah yang harus diberikan bekas suami menunjukkan fleksibilitas Hukum Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan kemampuan suami memberi nafkah sangat berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing.

Mengingat Hukum Islam mengatur keharusan memberikan nafkah dalam waktu tertentu (selama masa iddah) dan putus jika bekas isteri telah menikah lagi, maka ketentuan tentang pemberian nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ untuk bekas isteri selama isteri tidak menikah lagi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam.³³

Karena antara hukum PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut hewat penulis diperlukan political will dari pemerintah untuk mengkaji kembali aturan-aturan tersebut karena pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami. Tujuannya adalah agar PNS yang beragama Islam dapat menjalankan aturan Islam dalam kehidupannya tanpa harus berbenturan dengan aturan-aturan yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Jika di dalam pemenuhan kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari gajinya akan berdampak buruk kepada keluarga baru bekas isteri, maka ketentuan sebagaimana PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika ini terjadi maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai. Karena Islam mengutamakan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

³³ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, UI Press, 2009) h. 78

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.³⁴

Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca perceraian adanya mut'ah yakni pemberian hiburan kepada bekas isterinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri selama bekas isteri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah bekas isteri melewati masa iddah.
- Kewajiban bekas suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada bekas isterinya sampai bekas isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak-belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada bekas isteri hingga bekas isteri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi bekas suami itu sendiri maupun keluarga baru bekas suami tersebut.

Daftar Pustaka

Adhim, Muhammad Fauzan, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Pers
 Ahmad, Abu dan Cholid Narbuko, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa
 AlHamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani: Jakarta
 Al-Bayan, 2008, *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Jabal
 Al-Hasyimi, 1993, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, Bandung: Sinar Baru
 Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1996, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta:

BulanBintang
 Aulawi, Wasil. 1994, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama
 Ayyub, Syaikh Hasan, 2001, *Fiqh al-Asrati al-Muslimati*, penterjemah Abdul Ghafar EM, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
 Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2009, *Fikih Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon, Jakarta: Amzah
 Basyarahil, Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Yogyakarta: Gema Insani
 Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
 Bigha, Mustafa Dibul, 1999, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar
 Departemen R.I, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-1, Jilid. VI
 Dibul Bigha, Mustafa, 1999, *Fiqh Syafi'i*, terj. Sunarto, Surabaya: Bintang Pelajar
 Faiz, Ahmad, 2002, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Dirurais
 Hamid, Warno, 1999, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Surabaya: Insan Cendikia
 Hamka, 2003, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional
 Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, 2004, *Fikih Islam Lengkap*, Rineka Cipta, Jakarta
 Kelana, Mulya, 1999, *Kamus Istilah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
 Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
 Mughniyah, Muhammad Jawad, 2007, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera
 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2010, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain dkk, Jakarta: Darus Sunnah
 Muhammad Jawad Mughniyah, 2002, *Al Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur AB, Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, PT.Lentera Basritama, Jakarta
 Muhammad, Al-Ibrahim Jamal, 1994, *Fiqh Al-Mariti Al-Muslimati*, Penterjemah, Zaid Husain Al-Hamid, , Jakarta: Pustaka Amani

³⁴ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Kaidah-kaidah...*h. 520.

- Muhammad, Syaikh Al-Allamah, Fiqh Empat Mazhab, terj. Muhammad Zaki Alkaff, Bandung: Hasyimi
- Muhammad, Syamsuddin bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah
- Muktar, Kamal, 1999, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang
- Munawir Ahmad Warson, 1984, Kamus al Munawwir, Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir
- Nasution, Khoiruddin, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam di Dunia Muslim, Jakarta: Academia
- Ni'am Sholeh, Asrorun, 2008, Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: Elsas
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana: Jakarta
- Nurudin, Amiur dan Azhar A Tarigan, 2006, Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI), cet. ke-3, Jakarta: Kencana
- Prodjohamidjojo. Marjiman, 2011, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Rafiq, Ahmad, 2000, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahman, Abdul, 1996, Perkawinandalamsyariat Islam, Jakarta: RinekaCipata
- Ramulyo, Idris. 2004. Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasjid, Sulaiman, 2014, FiqhIslam, Bandung: SinarBaruAlgensindo
- Rifa'i, Moh, tt, Hukum Fiqih Islam Lengkap, Karya Toha Putra: Semarang
- Rusyd, Ibnu, 2007, Bidajatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid, 1991, Fiqh Sunnah, Jilid 8, alih bahasa Muhammad Thib, Bandung: Al Maarif
- Saebani, Beni Ahmad, 1999, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, Jakarta: Pustaka Setia
- Sanusi, Nur Taufiq, 2011, Fikih Rumah Tangga, Jakarta: Elsas
- Shihab, M.Quraish, 1996, Wawasan Alquran, Bandung: Mizan

